

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, "*Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*", dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPATK Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- A.R., Putri, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Barda, Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cetakan ke 3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penleitan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Istilah “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat juga Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).

Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2011, “*Studi Notaris dan Serba Serbi Praktik Notaris*” Cetakan Kedua, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Lestari, Ahdiana Yuni, & Heriyani, Endang, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, MocoMedia, Yogyakarta.

Muhammad, Kadir, Abdul, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Noatis dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Notodisoerjo, Soegondo, R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8*, Liberty, Yogyakarta.

Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.

Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2007, “*Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*”, Gloria Juris, Volume 7, nomor 1, Jakarta.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, Yogyakarta.

Soesanto, R., 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R. dan Tjitrosudibyo, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Vollmar, H.F.A., 1948, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wironegoro, K, Rio, 2017, Diktat Kuliah, Yogyakarta.

## **B. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Bogor, Putusan No. 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**IMPLIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH OLEH NOTARIS (Studi Putusan  
Perkara Nomor**

**125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.)**

RANDA JAPUTRA, Dr.Hartini,SH.,MS.i.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

### **C. Jurnal/ Artikel/ Tesis**

Andi Mamminanga, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Irene Dwi Enggarwati, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Swire, Peter P., "Bank Insolvency Law Now That It Matters Again," 42 *Duke Law Journal* , 469-556 (1992),  
Available at:  
<https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol42/iss3/1>.

Macey, R Jonathan, and Miller, Geoffrey P, "Bank Failures, Risk Monitoring, and the Market for Bank Control", *Columbia Law Review*., Oct, 1998, Vol. 88, No. 6.

Wibowo, Hendro, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widiyanti, Sri, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Pada Kebenaran Materil Akta yang DIBuatnya", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 992 Tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

#### **E. Internet**

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelebagaan.aspx>, diakses pada senin, 8 Maret 2021, 11.15 WIB.

#### **F. Lain-Lain**

Hasil wawancara dengan Muhammad Agus Hanafi, S.H., Selaku Dosen Penyusunan Kontrak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Nukman Muhammad. S.H., M.Kn., M.M, Selaku Dosen Penyusunan Kontrak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Teknik Pembuatan Akta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 4 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Dosen Hukum Perbankan Syariah Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta dan sekaligus Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 4 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Penyusunan Kontrak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Peraturan Jabatan Notaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 4 Mei 2021.